

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kupang, 30 Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah,

Marciana Dominika Jone, S.H
NIP 196411261991032001

DAFTAR ISI
TAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan : W.J. Lamentik No.98 Kupang Kode Pos : 85111

Laman: <https://ntt.kemenkumham.go.id>, Surel: ntt.kanwil@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 30 Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah,

Marciana Dominika Jone, S.H
NIP 196411261991032001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp14.105.049**.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar **Rp 16.254.050.498** atau mencapai **99,27** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp16.374.423.000**.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar **Rp72.054.762.755** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp57.398.600**; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp0**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp71.953.875.084**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp43.489.071**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp72.054.762.755**.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp128.300.000**, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp9.981.593** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp16.120.788.341**. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp4.123.456** dan sebesar **Rp0** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp16.116.674.885**.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar **Rp69.324.431.983** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp16.116.674.885** ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp0** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp18.847.005.657** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp72.054.762.755**.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	TA 2022			%	TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)		Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	14.105.049	14.105.049	-	65.047.751
Jumlah Pendapatan dan Hibah		-	14.105.049		-	65.047.751
Belanja	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	9.844.273.000	9.839.655.266	4.617.734	99,95	9.674.546.149
Belanja Barang	B.4	5.615.105.000	5.589.223.152	25.881.848	99,54	5.830.841.415
Belanja Modal	B.5	915.045.000	825.172.080	89.872.920	90,18	3.087.334.047
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		16.374.423.000	16.254.050.498	120.372.502	99,26	18.592.721.611

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.7	-	-
Beban Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	57.398.600	16.769.950
JUMLAH ASET LANCAR		57.398.600	16.769.950
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	51.308.798.800	49.122.225.800
Peralatan dan Mesin	C.2.2	11.326.581.533	10.706.259.372
Gedung dan Bangunan	C.2.3	23.530.346.446	20.990.840.531
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	109.656.391	96.656.391
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	2.147.614.835
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	- 15.419.375.701	- 13.793.340.285
JUMLAH ASET TETAP		70.856.007.469	69.270.256.644
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan TP/TGR	C.3.1	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.2	-	-
Tagihan TP/TGR	C.3.3	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	7.750.000	-
Aset Lain-Lain	C.4.2	1.358.273.149	1.358.273.149
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	- 1.325.169.146	- 1.320.867.760
JUMLAH ASET LAINNYA		40.854.003	37.405.389
JUMLAH ASET		70.954.260.072	69.324.431.983
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.3	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.4	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	70.954.260.072	69.324.431.983
JUMLAH EKUITAS		70.954.260.072	69.324.431.983
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		70.954.260.072	69.324.431.983

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	9.981.593	27.129.628
JUMLAH PENDAPATAN		9.981.593	27.129.628
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	9.839.655.266	9.674.546.149
Beban Persediaan	D.3	167.276.350	193.237.650
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.942.408.852	3.376.516.518
Beban Pemeliharaan	D.5	823.050.700	928.989.715
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.618.799.600	1.318.501.082
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.460.527.829	1.741.946.608
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		16.851.718.597	17.233.737.722
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16.841.737.004)	(17.206.608.094)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		4.123.456	(128.600.000)
Pendapatan pelepasan aset non lancar		4.123.456	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	128.600.000
SURPLUS/DEFISIT dari kegiatan non operasional lainnya		4.123.456	37.918.123
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	37.918.123
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	4.123.456	(90.681.877)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(16.837.613.548)	(17.297.289.971)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.12	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(16.837.613.548)	(17.297.289.971)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	69.324.431.983	75.726.693.906
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16.837.613.548)	(17.297.289.971)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(379.564.020)	(7.432.144.934)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	(379.564.020)	(7.432.144.934)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(379.564.020)	(7.432.144.934)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	18.847.005.657	18.327.172.982
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.629.828.089	(6.402.261.923)
EKUITAS AKHIR	E.6	70.954.260.072	69.324.431.983

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan W. J. Lalamentik No.98, Oebobo, Kupang - NTT.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Demi mewujudkan tujuan diatas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT berkomitmen dengan visi “ Masyarakat Nusa Tenggara Timur memperoleh kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berlandaskan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha”.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi aparatur hukum dan hak asasi manusia.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi.
3. Menyelenggarakan pelayanan dan penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual.
4. Menyelenggarakan penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
5. Menyelenggarakan perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian

Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Perintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp16.374.423.000**. Selama tahun 2022, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Akuntansi yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
	(dalam Rupiah)	
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	9.977.541.000	9.844.273.000
Belanja Barang	5.980.610.000	5.615.105.000
Belanja Modal	8.877.246.000	915.045.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	24.835.397.000	16.374.423.000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp14.105.049

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp14.105.049** atau mencapai **100 persen** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp 0**. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4.123.456	100
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	9.981.593	100
Jumlah	0	14.105.049	100

Realisasi Pendapatan Pendidikan TA 2022 mengalami Penurunan **21,68 persen** dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapatnya Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain pada Tahun 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Selain itu, terdapat peningkatan Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha sebesar 209,85 persen yang berasal dari pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	14.105.049	6.721.492	209,85
Pendapatan Denda	0	20.408.136	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	37.918.123	0,00
Jumlah	14.105.049	65.047.751	21,68

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp
16.254.050.498

Realisasi Belanja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT pada TA 2022 adalah sebesar **Rp16.254.050.498** atau **99,81%** dari anggaran belanja sebesar **Rp16.374.423.000**. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	9.844.273.000	9.841.247.576	99,97
Belanja Barang	5.615.105.000	5.589.223.152	99,54
Belanja Modal	915.045.000	825.172.080	90,18
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	16.374.423.000	16.255.642.808	99,27
Pengembalian Belanja Pegawai	0	1.592.310	-
Jumlah	16.374.423.000	16.254.050.498	99,26

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami Penurunan sebesar **12,58 persen** dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena refocusing.
2. Menurunnya Anggaran Belanja Barang.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Pegawai	9.839.655.266	9.674.546.149	1,71
Belanja Barang	5.589.223.152	5.830.841.415	(4,14)
Belanja Modal	825.172.080	3.087.334.047	(73,27)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah	16.254.050.498	18.592.721.611	(12,58)

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp9.839.655.266*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp9.839.655.266** dan **Rp9.674.546.149**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar **1,71 persen** dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai dan perekrutan CPNS baru tahun 2022
- 2.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.762.960.576	9.583.237.615	1,88
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	0,00
Belanja Honorarium	-	-	0,00
Belanja Lembur	78.287.000	91.866.000	-14,78
Jumlah Belanja Kotor	9.841.247.576	9.675.103.615	1,72
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.592.310)	(557.466)	185,63
Jumlah Belanja	9.839.655.266	9.674.546.149	1,71

Belanja Barang
Rp5.589.223.152

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp5.589.223.152** dan **Rp5.830.841.415**. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami Penurunan **4,14%** dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Berkurangnya Belanja Jasa sewa kendaraan.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Barang Operasional	1.553.157.170	1.363.513.833	13,91
Belanja Barang Non Operasional	533.611.600	447.925.859	19,13
Belanja Persediaan	219.410.000	225.308.500	-2,62
Belanja Jasa	855.640.082	1.565.076.826	-45,33
Belanja Pemeliharaan	808.604.700	921.487.212	-12,25
Belanja Perjalanan Dinas	1.618.799.600	1.318.501.082	22,78
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	5.589.223.152	5.841.813.312	-4,32
Pengembalian Belanja Barang	-	(10.971.897)	0,00
Jumlah Belanja	5.589.223.152	5.830.841.415	-4,14

Belanja Modal
Rp825.172.080

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp825.172.080** dan **Rp3.087.334.047**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami Penurunan sebesar **73,27%** dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh pengurangan anggaran belanja modal pada tahun 2022 karena refocusing.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	426.860.000	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	398.312.080	3.087.334.047	-87,10
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	825.172.080	3.087.334.047	-73,27
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	825.172.080	3.087.334.047	-73,27

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi tersebut pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan Tidak adanya anggaran Belanja Modal Tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Modal Tanah	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja Modal	-	-	#DIV/0!

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp426.860.000

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar **Rp426.860.000**, mengalami kenaikan sebesar **100 persen** bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar **Rp 0**. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin berupa Laptop, PC dan Printer sebagai fasilitas pendukung kerja pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
PC	508.700.000	-	#DIV/0!
Laptop	223.415.000	-	#DIV/0!
Printer	90.000.000	-	#DIV/0!
Kamera Udara			
Jumlah Belanja Kotor	822.115.000	-	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	#DIV/0!

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp398.312.080

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp398.312.080** dan **Rp3.087.334.047**. Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami Penurunan sebesar **87,10 persen** dibandingkan Realisasi TA 2021. Belanja Gedung dan Bangunan ini

berasal dari Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Renovasi Gedung Kantor	398.312.080	3.087.334.047	-87,10
Jumlah Belanja Kotor	398.312.080	3.087.334.047	-87,10
Pengembalian Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Modal	398.312.080	3.087.334.047	-87,10

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp 0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan Tidak adanya anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Modal	-	-	#DIV/0!

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Modal	-	-	#DIV/0!

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp57.398.600

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp57.398.600** dan **Rp16.769.950**. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Uang Tunai	-	-
Bank BRI No. Rek. 0039-01-001039-30-4	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel xx
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1		-	-
2		-	-
	Jumlah	24.000.000	-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1		-	-
2		-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10,0%	-
Diragukan	-	50,0%	-
Macet	-	100,0%	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10,0%	-
Diragukan	-	50,0%	-
Macet	-	100,0%	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10,0%	-
Diragukan	-	50,0%	-
Macet	-	100,0%	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		-	-

Beban Dibayar di Muka
Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp3.200.000

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM NTT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp57.398.600

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp57.398.600** dan **Rp16.769.950** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
Barang Konsumsi	52.170.600	13.170.450
Barang untuk Pemerlihaaran	5.228.000	3.599.500
Jumlah	57.398.600	16.769.950

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp70.856.007.469

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp70.856.007.469** dan **Rp69.270.256.644**.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp51.308.798.800

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp51.308.798.800** dan **Rp49.122.225.800**

cMutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	49.122.225.800
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	2.186.573.000
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2022	51.308.798.800
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	51.308.798.800

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Tanah TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	5.000 m ²	Jl. Cendrawasih No. 5, Bogor	1.000.000.000
2	2.000 m ²	Jl. Matoa No. 20, Bogor	500.000.000
3	3.000 m ²	Jl. Padjajaran No. 28, Bogor	750.000.000
4	10.000 m ²	Jl. Salak No. 18, Bogor	3.700.000.000
Jumlah			5.950.000.000

Tanah seluas 2.000 m² yang terletak di Jl. Matoa No. 20, Bogor pada tanggal pelaporan dikuasi/digunakan oleh pihak ketiga.

Peralatan dan Mesin
Rp11.326.581.533

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp11.326.581.533** dan **Rp10.706.259.372**.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	10.706.259.372
Mutasi tambah:	
Pembelian	426.860.000
Hibah	-
Transfer Masuk	193.462.161
Koreksi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	
Saldo Per 31 Desember 2022	11.326.581.533
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(10.417.136.089)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	909.445.444

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembelian komputer unit berupa PC senilai Rp700.000.000
2. Pembelian peralatan komputer berupa Laptop senilai Rp112.215.000.
3. Pembelian peralatan komputer berupa printer senilai Rp112.215.000.

Transfer Masuk peralatan kantor senilai Rp137.000.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp23.530.346.446

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp23.530.346.446** dan **Rp20.990.840.531**.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2022
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	20.990.840.531
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	2.922.903.915
Mutasi Kurang:	
	(383.398.000)
Saldo Per 31 Desember 2022	23.530.346.446
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(5.002.239.612)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	18.528.106.834

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari Transfer Masuk 2 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp376.977.000, Pengerjaan Perencanaan Gedung Kantor Senilai Rp398.312.080, dan Realisasi Pengembangan dari KDP Senilai Rp2.147.614.835,000

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp0

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	-

Mutasi tambah: -

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp109.656.391

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp109.656.391** dan **Rp96.656.391** dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	96.656.391
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	13.000.000
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 31 Desember 2022	109.656.391
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	109.656.391

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp2.147.614.835** yang merupakan KDP renovasi gedung dan bangunan berupa Ruang Aula dan Ruang Arsip yang

proses pengerjaannya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Pembangunan gedung tersebut pada tahun 2021 sudah direalisasikan menjadi Aset pada Tahun 2022.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp (15.419.375.701)*

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp15.419.375.701** dan **Rp13.793.340.285**.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

*Tabel xx
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	11.326.581.533	10.417.136.089	909.445.444
2	Gedung dan Bangunan	23.530.346.446	5.002.239.612	18.528.106.834
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	109.656.391	-	109.656.391
	Jumlah	34.966.584.370	15.419.375.701	19.547.208.669

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0*

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas

suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1		-	-
2		-	-
	Jumlah	-	-

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp0**. dan **Rp0**, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang TPA TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1		-	-
2		-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel xx
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang
TA 2022

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		
Tagihan TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		-	-

Aset Lainnya
Rp40.854.003

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp40.854.003** dan **Rp37.405.389**. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp7.750.000

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp7.750.000** dan **Rp0**.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	7.750.000
Saldo Per 31 Desember 2022	7.750.000
Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(968.750)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	6.781.250

Mutasi tambah:

Transfer Masuk berupa aplikasi Pembuatan Bar Code Sertifikat AHU Rp7.750.000 dari Divisi Pelayanan Hukum (408882) .

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Aplikasi Pembuatan Bar Code Sertifikat AHU	7.750.000
	Jumlah	7.750.000

Aset Lain-Lain
Rp1.358.273.149

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah **Rp1.358.273.149** dan **Rp1.358.273.149**. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	1.358.273.149
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo Per 31 Desember 2022	1.358.273.149
Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(1.325.169.146)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	33.104.003

Tidak terdapat Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp1.325.169.146

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp1.325.169.146** dan **Rp1.320.867.760**. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2022

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1	Software	7.750.000	(968.750)	6.781.250
	Jumlah	7.750.000	(968.750)	6.781.250
B.	Aset Lain-lain	1.358.273.149	(1.325.169.146)	33.104.003
	Jumlah	1.358.273.149	(1.325.169.146)	33.104.003
	Total	1.366.023.149	(1.326.137.896)	39.885.253

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka

Pendek Rp0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Uang Muka dari KPPN

Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak

Ketiga Rp0

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-
2	Potongan Pajak yang belum disetor	-
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
	Total	-

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
	-
	-
	-
Jumlah	-

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	0
Jumlah	-	0

Ekuitas
Rp70.954.260.072

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp70.954.260.072** dan **Rp69.324.431.983**. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp9.981.593

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar **Rp9.981.593** dan **Rp27.129.628**. Pendapatan tersebut terdiri:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	9.981.593	6.721.492	48,50
Pendapatan Denda	-	20.408.136	(100,00)
Pendapatan Lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah	9.981.593	27.129.628	(63,21)

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp
9.839.655.266

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp9.839.655.266** dan **Rp9.674.546.149**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Gaji	6.784.947.480	6.569.973.535	3,27
Beban Tunjangan-tunjangan	2.976.420.786	3.012.706.614	(1,20)
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	#DIV/0!
Beban Lembur	78.287.000	91.866.000	(14,78)
Jumlah Beban	9.839.655.266	9.674.546.149	1,71

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp167.276.350

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp167.276.350** dan **Rp193.237.650**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban

Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Persediaan Konsumsi	167.276.350	193.237.650	-13,43491
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban	167.276.350	193.237.650	-13,43

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp2.942.408.852

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp2.942.408.852** dan **Rp3.376.516.518**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.180.120.770	822.546.203	43,47
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.764.500	10.750.900	(46,38)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	228.000.000	208.290.000	9,46
Beban Barang Operasional Lainnya	12.012.450	236.616.730	(94,92)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	127.259.450	85.310.000	49,17
Beban Bahan	391.722.300	341.650.150	14,66
Beban Honor Output Kegiatan	98.860.000	51.800.000	90,85
Beban Barang Non Operasional Lainnya	43.029.300	54.475.709	(21,01)
Beban Langganan Listrik	219.192.682	205.565.008	6,63
Beban Langganan Air	22.955.000	8.440.000	171,98
Beban Sewa	587.654.400	1.295.880.818	(54,65)
Beban Jasa Profesi	23.600.000	25.200.000	(6,35)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.238.000	29.991.000	(92,54)
Jumlah Beban	2.942.408.852	3.376.516.518	(12,86)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp823.050.700

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp823.050.700** dan **Rp928.989.715**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	382.417.800	417.585.353	(8,42)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	426.186.900	492.929.962	(13,54)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	14.446.000	18.474.400	(21,81)
Jumlah Beban	823.050.700	928.989.715	(11,40)

Beban
Perjalanan
Dinas Rp
1.618.799.600

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp1.618.799.600** dan **Rp1.318.501.082**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.557.399.600	1.155.221.082	34,81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.400.000	163.280.000	(62,40)
Jumlah Beban	1.618.799.600	1.318.501.082	22,78

Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp
1.460.527.829

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp1.460.527.829** dan **Rp1.741.946.608**. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	425.466.501	725.331.880	(41,34)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.030.759.942	948.896.458	8,63
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	67.718.270	(100,00)
Jumlah Penyusutan	1.456.226.443	1.741.946.608	(16,40)
			-
Beban Amortisasi Software	968.750	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	3.332.636	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	4.301.386	-	#DIV/0!
Jumlah Beban	1.460.527.829	1.741.946.608	(16,16)

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak

Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Kegiatan Non Operasional
Rp4.123.456

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.123.456	-	#DIV/0!
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	(128.600.000)	(100,00)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		37.918.123	(100,00)
Jumlah Beban	4.123.456	(90.681.877)	(104,55)

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022 dan 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp69.324.431.983

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp69.324.431.983** dan **Rp75.726.693.906**.

Defisit LO
Rp
16.837.613.548

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah defisit sebesar **Rp16.837.613.548** dan **Rp17.297.289.971**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0
Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp0**.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2022

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp379.564.020

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp379.564.020** dan **Rp7.432.144.934**.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	(379.564.020)
Jumlah	(379.564.020)

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2022

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas Rp
18.847.005.657

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp18.847.005.657** dan **Rp18.327.172.982**.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel xx

Transaksi Antar Entitas TA 2022

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	14.105.049
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.254.050.498
Transfer Masuk	2.607.060.208
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	18.847.005.657

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar **Rp14.105.049** sedangkan DKEL sebesar **Rp16.254.050.498**.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp2.607.060.208**, terdiri dari:

Tabel xx

Transfer Masuk TA 2022

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Divisi Yankum (408882)	64.667.371
		Ditjen KI (097102)	29.625.000
		Divisi Imigrasi (408884)	4.429.000
2	Tanah	Balai Pemasarakatan Kupang (109148)	2.186.573.000
3	Gedung dan Bangunan	Balai Pemasarakatan Kupang (109148)	298.074.837
4	Software	Divisi Yankum (408882)	7.750.000
5	Aset Tetap Lainnya	Divisi Yankum (408889)	13.000.000
6	Persediaan	Divisi Yankum (408882)	2.941.000
Jumlah			2.607.060.208

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp0** dari total **Rp0** yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah **Rp0**. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Pengesahan Hibah Langsung TA 2022

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.			0
2.			0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir Rp
70.954.260.072

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp70.954.260.072** dan **Rp69.324.431.983**.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- Nihil-

F.1 Pengungkapan Lain-lain

- Nihil-